

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Kesimpulan Faktual

Dari penelitian ini penulis dapat menemukan bahwa:

1. Terjadi persaingan di lembaga partai politik dan dominasi etnik, agama di legislatif (DPRD II) kota Pematang Siantar
2. Terjadi ketidakseimbangan dalam komposisi elit parpol dan anggota legislatif di DPRD II Pematang Siantar karena didominasi etnik dan agama tertentu.
3. Parpol berbasis nasionalis seperti PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar selalu memainkan peranan aktif dalam pencalonan Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar 2005.
4. Komposisi etnik dan agama sesuai BPS Tahun 2000 sesuai dengan cerminan anggota legislatif yang duduk di DPRD II.
5. Pilkadasung mencerminkan persaingan etnik besar Toba dan etnik asli (Simalungun) dalam perebutan kekuasaan di legislatif dan eksekutif.
6. Koalisi partai tidak menunjukkan/mencerminkan perolehan suara
7. Dominasi etnik dan agama relevan dengan perolehan masing-masing pasangan calon.

6.2 Kesimpulan Konseptual

1. Etnisitas, agama, kekerabatan (*kinships*) merupakan modalitas menuju kekuasaan.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

2. Konsep *patron client* dan adanya aktivitas “saling beri” *reciprocity* sangat berkaitan dengan modal dalam membangun kekuasaan (*Building of power*)

6.3 Implikasi

Tingkat partisipasi warga Pematang Siantar yang sangat rendah (58,76%) merupakan cerminan dari kurang akomodatifnya KPUD dalam verifikasi calon pasangan kepala daerah. Golput atau warga yang tidak berpartisipasi dalam Pilkadaesung mencapai 41,24 % perlu menjadi catatan khusus, karena nantinya bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada kepemimpinan pejabat yang dipilih sehingga aspek validitas seorang pemimpin diragukan.

Kebiasaan ganti pejabat ganti kebijakan khususnya mengenai dan menyangkut kepentingan publik bisa menimbulkan sikap apatis warga apabila kebijakan tersebut merugikan warga atau kelompok yang tidak memilih. Untuk itu, diperlukan sikap arif dan bijaksana pada kepala daerah terpilih dengan merealisasikan janji visi dan misinya sewaktu kampanye.

6.4 Saran

Alangkah baiknya rekrutmen Politik dalam Pilkada ini berlangsung lebih sehat dan transparan dan benar-benar Pilkadaesung dari rakyat oleh rakyat tanpa intervensi elit partai politik, sehingga gejala apatisisme-sinisme (siapaapun pemimpin sama saja), rakyat menjadi aktif dan partisipatif.

Pemerintah pusat perlu merevisi dan menyempurnakan UU No. 22 tahun 2004 yang menghilangkan dominasi partai politik (besar) dalam proses pengajuan calon,

dimungkinkan adanya calon *independen* yang telah teruji publik setempat dari aspek moral dan jasanya terhadap daerah, juga perbaikan pasal-pasal yang kontraproduktif, multiinterpretatif dan tidak akomodatif di mata publik.

Hendaknya netralitas Panwaslu dan KPUD harus dijaga, mengingat mereka sebagai wasit. Ketidaknetralan dan ketidakadilan menimbulkan konflik di tingkat bawah/masyarakat pemilih. Sebab selama ini, pembentukan KPUD dan Panwaslu atas order dari *incumbent* (yang telah/sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Konflik yang terjadi sifatnya hanya temporer dan cenderung muncul karena tidak netralnya KPU dan Panwaslu.

Pencalonan Kepala Daerah yang berlatar belakang etnis dan agama hendaknya harus memperhatikan *capacity, morality, competency, honesty, integrity dan dedicate* dari calon tersebut sehingga layak dijual ke publik sebab rakyat makin cerdas dan pintar.

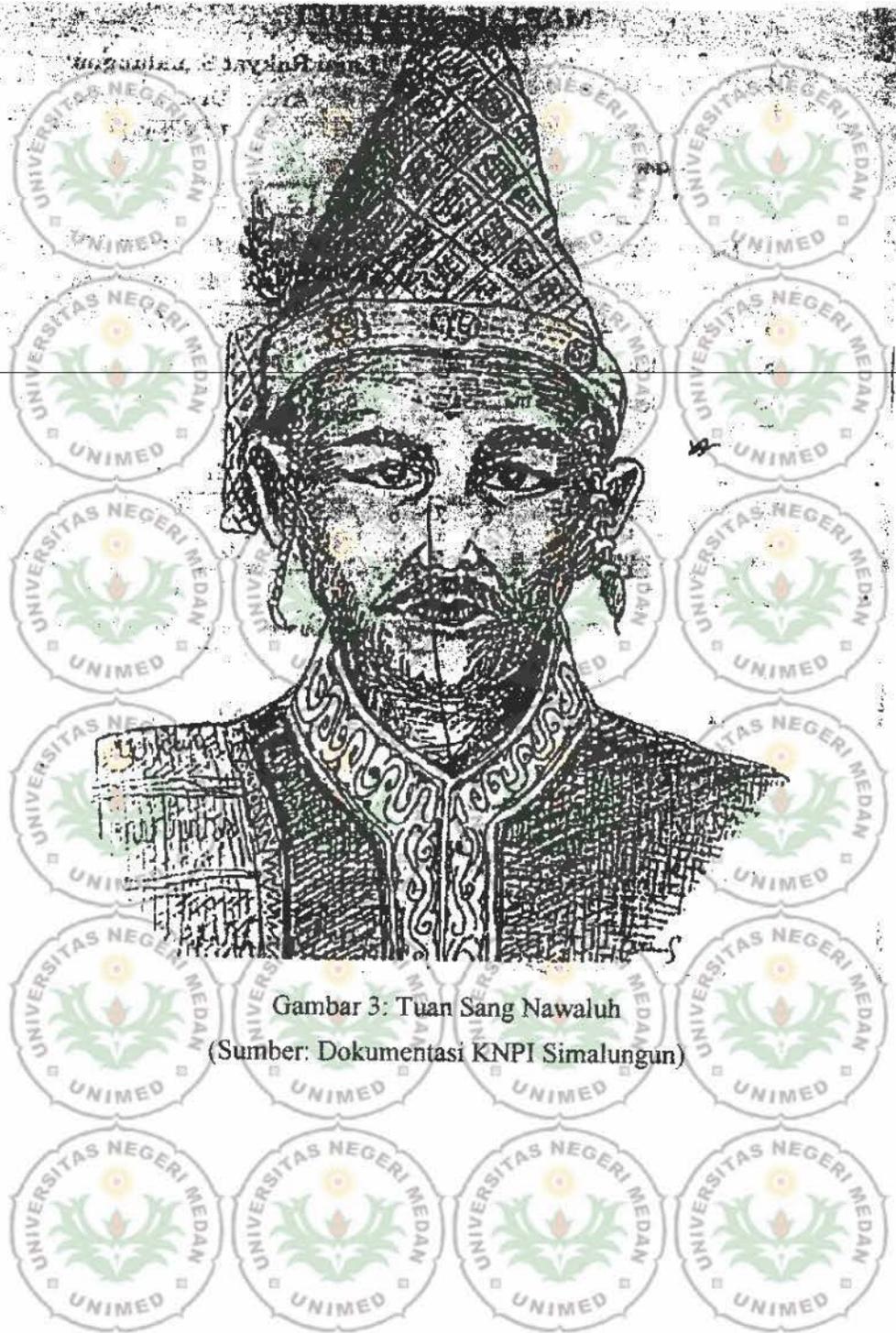


Gambar 1: Foto Sekretariat Kemenangan Lingga-Fatimah di DPC II PDIP
Jl. A. Yani No. 106



Gambar 2: Posko Pemenangan Dartatik-Anggiat di DPC PAN Jl. Ade Irma Suryani No. 50^B Pematang Siantar





Gambar 3: Tuan Sang Nawaluh
(Sumber: Dokumentasi KNPI Simalungun)



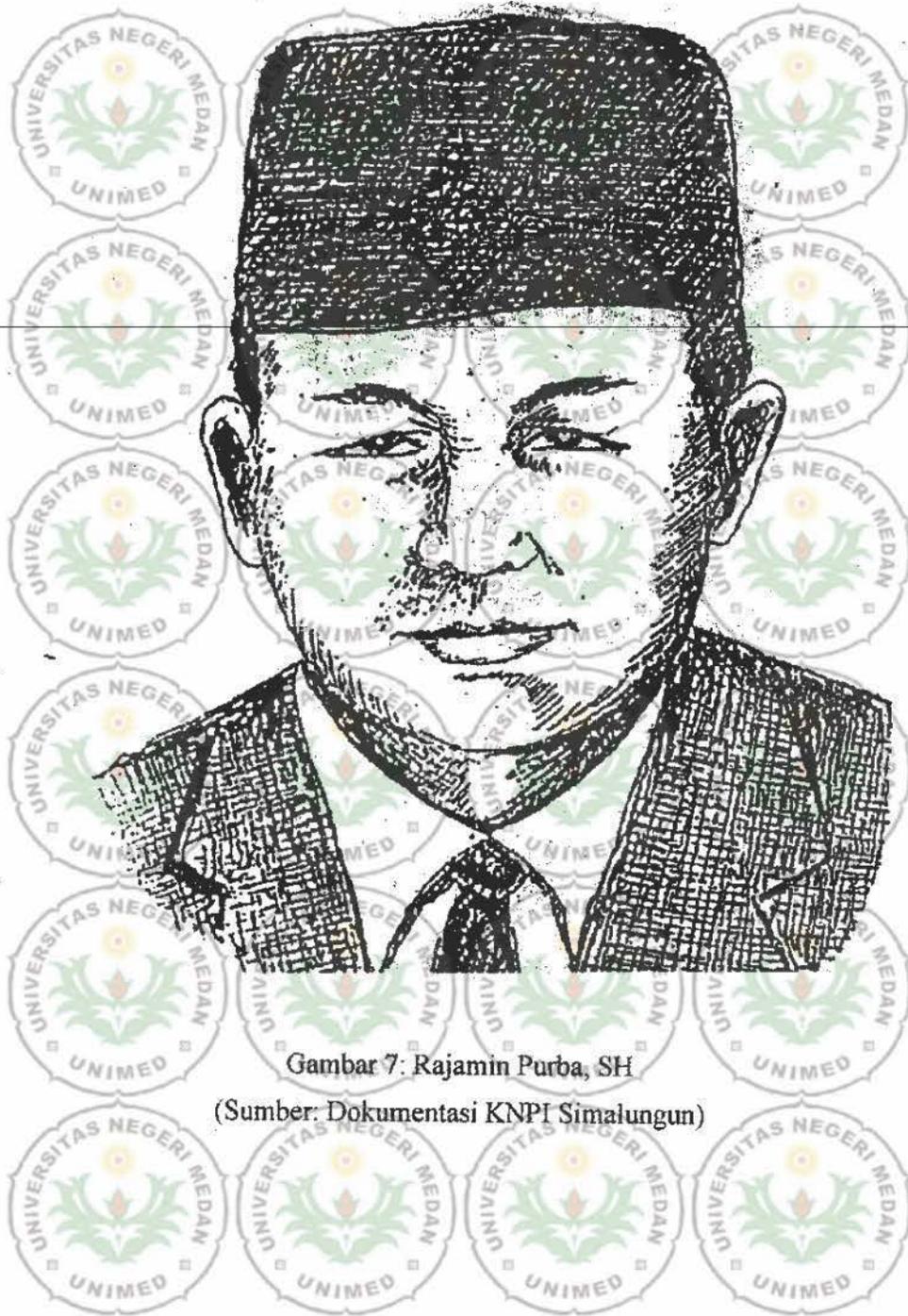
Gambar 4: Tuan Rondahaim
(Sumber: Dokumentasi KNPI Simalungun)



Gambar 5: Pdt. J. Wismar Saragih
(Sumber: Dokumentasi KNPI Simalungun)



Gambar 6: Dr. Josamen Saragih
(Sumber: Dokumentasi KNPI Simalungun)



Gambar 7: Rajamin Purba, SH
(Sumber: Dokumentasi KNPI Simalungun)

Peta Kotamadya P. Siantar

